

MENUJU PENGUATAN HAK-HAK PEREMPUAN

Maria Ulfah Anshar

Ketua Umum PP Fatayat NU



Kongres Fatayat NU beberapa waktu yang lalu memutuskan bahwa salah satu program unggulan yang hendak diupayakan adalah penguatan hak-hak perempuan, termasuk di dalamnya mengondisikan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Wujud konkretnya adalah *training-training* tentang sensitivitas gender serta beberapa kegiatan pendukung lainnya semisal *workshop*, penyuluhan, diskusi tentang interpretasi teks yang bias jender, penerbitan *bulletin*, dan pelayanan korban (*crisis centre*) untuk penguatan hak-hak perempuan, termasuk juga untuk penguatan hak kesehatan reproduksi perempuan.

Untuk penguatan hak-hak perempuan, Fatayat NU memberikan pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan. Untuk penguatan hak-hak reproduksi, selain *training*, penyuluhan dan sebagainya, Fatayat NU juga mempunyai pusat informasi kesehatan reproduksi. Pusat informasi kesehatan reproduksi berada di tingkat komunitas, kecamatan. Sementara pembentukan *crisis center*, karena jumlahnya terbatas, baru terbentuk di tingkat kabupaten.

Seluruh agenda itu idealnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Namun saat ini masih terbatas pada beberapa wilayah rintisan. Misalnya, terbentuknya *crisis center* hanya terbatas di tujuh propinsi, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, NTB. Sedangkan program penguatan hak-hak kesehatan reproduksi dengan Pusat Pelayanan Kesehatan Reproduksi-nya itu masih terbentuk di tingkat kecamatan. Jadi, satu kecamatan dibentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang mewakili satu provinsi. Pusat Pelayanan Kesehatan Reproduksi itu sampai kini baru terbentuk di 11 provinsi plus satu provinsi swadaya. Provinsi swadaya dimaksud adalah bahwa pembiayaannya tidak berasal dari funding, melainkan swadaya lembaga itu sendiri. Ini misalnya terbentuk di Banten yang merupakan pecahan dari provinsi Jawa Barat.

Sebenarnya, program penguatan hak-hak perempuan telah dirancang sejak 1998. Saat itu, Fatayat-NU belum mendapat bantuan dana dari mitra mana pun. Diawali dengan *workshop* yang merencanakan kegiatan yang

terkait dengan isu-isu jender dalam perspektif Islam, yang kemudian dike-rangkakan lagi dengan isu-isu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai NU dan Aswaja, Fatayat-NU me-ngundang lembaga mitra semisal The Asia Foundation (TAF), Ford Foundation (FF), dan lembaga mitra lainnya untuk berbagi gagasan dalam merancang kegiatan tersebut. Workshop itu akhirnya menye-pakati sebuah rumusan program kegiatan yang terkait dengan isu-isu jender dalam



perspektif Aswaja. Sejak saat itulah banyak kalangan yang tertarik untuk men-*follow up*-i, sungguhpun di kalangan internal NU, rencana program itu banyak men-dapatkan penolakan. Namun Fatayat-NU tetap bertekad untuk mencoba sekali lagi melakukan workshop yang didukung oleh TAF. Dari workshop inilah lahir program penguatan hak-hak perempuan yang kemudian melahirkan *crisis center*. Dalam perjalanannya, Fatayat NU mengem-bangkan program tersebut dengan lebih menfokuskan diri pada hak-hak kesehatan reproduksi yang bermitra dengan FF. Kerja sama ini berlangsung hingga saat ini.

Secara filosofis, pemilihan isu pe-nguatan hak-hak perempuan sebenarnya terkait dengan program penguatan

perempuan yang menjadi program Fatayat NU. Memang pada mulanya, perspektif yang disuguhkan belum terfokus, apakah penguatan hak-hak perempuan itu hendak menggunakan perspektif jender atau perspektif pe-merintah. Kalau dirunut, pada tahun 1990-an, setelah kongres di Kaliurang, Fatayat NU yang menjadi “anak emas” pemerintah, memang ada *grant* khusus yang disediakan Depag untuk LSM agama. Kegiatan yang ditawarkan adalah Bina Balita. Bina Balita itu sebenarnya nama lain dari program pemerintah untuk kelangsungan hidup anak. Dan Fatayat NU satu dari sejumlah LSM agama yang menerima program yang dibiayai UNICEF, UNDP, dan beberapa lembaga mitra ini melalui Departemen Agama.

Namun, menyadari bahwa program tersebut lebih memihak pada pemerintah ketimbang pada pemberdayaan anggota, maka Fatayat NU kemudian melakukan evaluasi program. Saat itu, muncul alternatif-alternatif kritis dan mengajukan perubahan paradigmatis. Bagi Fatayat NU, program Bina Balita itu bukan tidak penting, tapi yang jauh lebih penting adalah penguatan ekonomi. Dari penguatan ekonomi warga inilah, Balita dapat dibina dan diselamatkan. Fatayat NU berasumsi bahwa meskipun kita mengampanyekan perlunya gizi dan perhatian pada kesehatan Balita, namun tanpa ditopang oleh penguatan ekonomi warga, kampanye itu tidak akan bermakna. Atas dasar itu, Fatayat NU merancang program penguatan pengembangan kesehatan masyarakat dan penguatan ekonomi. Dari program ini, tampak adanya kebutuhan-kebutuhan pada keberpihakan pada anggota. Meskipun dalam realisasinya ada hambatan, namun upaya itu terus dilakukan, terutama melalui agenda penguatan institusi yang wujud konkretnya membentuk

kepengurusan Fatayat di tingkat anak cabang dan ranting. Dengan membentuk institusi dari yang paling bawah, maka upaya pemberdayaan anggota yang basisnya di pedesaan bisa tercapai.

Bagi Fatayat NU, program-program itu masih dianggap relevan dan strategis untuk terus ditindaklanjuti. Dan Fatayat NU harus bergerak di dua ranah, yaitu ranah *grass root* dan ranah elit. Dalam ranah *grass root* diupayakan adanya pembinaan intensif dari segi pemberdayaan dan peningkatan kemampuan kritis warga. Artinya, pelatihan bukan semata-mata pelatihan, melainkan pelatihan yang mampu melahirkan kesadaran bagi warga untuk terus mencari dan berkreasi secara mandiri. Di tingkat atas, Fatayat NU harus mampu bermain di level kebijakan untuk perubahan-perubahan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Semua itu mungkin dicapai dengan melibatkan jaringan-jaringan serta kerja sama dengan lembaga terkait, khususnya lembaga-lembaga yang *concern* dalam advokasi perundang-undangan yang terkait dengan isu perempuan. ■